

PROTOKOL 5
MENGENAI KEBEBASAN HAK ANGKUT KETIGA DAN KEEMPAT
YANG TIDAK TERBATAS ANTARA IBUKOTA NEGARA ASEAN

Pemerintah – pemerintah Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Demokrasi Rakyat Laos (selanjutnya disebut "Laos"), Malaysia, Uni Myanmar, Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand, dan Republik Sosialis Vietnam, Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) (selanjutnya secara bersama-sama disebut "Para Pihak" atau secara sendiri-sendiri disebut "Pihak"):

MENGINGAT Persetujuan Multilateral ASEAN mengenai Jasa Angkutan Udara yang ditandatangani pada tanggal 20 Mei 2009 di Manila, Filipina (selanjutnya disebut "Persetujuan");

MENGAKUI bahwa Lampiran II Persetujuan tersebut memberikan penyelesaian Protokol-protokol Pelaksanaan yang wajib menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan dimaksud;

MENGAKUI juga ayat 3 Pasal I dari Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Peningkatan Kerja Sama Ekonomi ASEAN yang ditandatangani pada tanggal 28 Januari 1992 di Singapura, bahwa dalam pelaksanaan pengaturan ekonomi, dua atau lebih Negara-Negara Anggota dapat melaksanakan terlebih dahulu apabila Negara Anggota lain belum siap melaksanakan pengaturan tersebut; dan

BERKEINGINAN untuk menghilangkan pembatasan-pembatasan pada jasa angkutan udara dengan maksud untuk mencapai liberalisasi penuh di ASEAN pada tahun 2015,

TELAH MENYETUJUI HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT:

Pasal 1 – Rute dan Hak Angkut

Perusahaan angkutan udara yang ditunjuk dari masing-masing Pihak wajib diizinkan untuk melaksanakan jasa angkutan udara penumpang dari ibu kota negaranya ke ibu

kota negara Pihak-Pihak lainnya dan sebaliknya dengan kebebasan penuh hak angkut ketiga dan keempat sejak tanggal 31 Desember 2008.

Pasal 2 – Kapasitas dan Frekuensi

Wajib tidak ada pembatasan terhadap kapasitas, frekuensi dan jenis pesawat udara yang berkaitan dengan jasa angkutan udara penumpang yang dilaksanakan berdasarkan Protokol ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1.

Pasal 3 – Spesifikasi Titik

Ibu kota – ibu kota negara Para Pihak sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah sebagai berikut:

Brunei Darussalam	:	Bandar Seri Begawan
Kamboja	:	Phnom Penh
Indonesia	:	Jakarta
Laos	:	Vientiane
Malaysia	:	Kuala Lumpur
Myanmar	:	Yangon
Filipina	:	Manila
Singapura	:	Singapura
Thailand	:	Bangkok
Vietnam	:	Hanoi

Pasal 4 – Ketentuan Akhir

1. Protokol ini wajib disimpan oleh Sekretaris Jenderal ASEAN yang wajib segera menyampaikan salinan naskah tersebut kepada masing-masing Pihak.
2. Protokol ini tunduk pada ratifikasi atau penerimaan oleh para Pihak yang telah meratifikasi atau menerima Persetujuan tersebut. Piagam Ratifikasi atau

Penerimaan wajib disimpan oleh Sekretaris Jenderal ASEAN yang wajib segera memberitahukan kepada masing-masing Pihak mengenai penyimpanan tersebut.

3. Protokol ini wajib mulai berlaku pada tanggal penyimpanan Piagam Ratifikasi dan Penerimaan ketiga (ke-3) oleh Sekretaris Jenderal ASEAN dan hanya akan berlaku bagi para Pihak yang telah meratifikasi atau menerimanya. Bagi setiap Pihak yang meratifikasi atau menerima Protokol tersebut setelah penyimpanan Piagam Ratifikasi atau penerimaan ketiga (ke-3), Protokol dimaksud wajib mulai berlaku pada tanggal penyimpanan Piagam Ratifikasi atau penerimaan dari Pihak tersebut.
4. Setiap perubahan terhadap ketentuan–ketentuan Protokol ini, wajib berlaku berdasarkan kesepakatan seluruh Pihak, sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 16 Persetujuan tersebut.

SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, yang diberi kuasa untuk menandatangani oleh masing-masing Pemerintahnya, telah menandatangani Protokol 5 mengenai Kebebasan Hak Angkut Ketiga dan Keempat yang Tidak Terbatas antara Ibukota Negara ASEAN.

DIBUAT di Manila, Filipina, pada tanggal 20 bulan Mei Tahun Dua Ribu Sembilan, dalam satu naskah asli dalam bahasa Inggris.

Untuk Brunei Darussalam:

ttd

PEHIN DATO ABU BAKAR APONG
Menteri Komunikasi

Untuk Kerajaan Kamboja:

ttd

MAO HAVANNAL
Menteri Negara
Kementerian Negara Bidang Penerbangan Sipil

PROTOKOL 6
MENGENAI KEBEBASAN HAK ANGKUT KELIMA YANG TIDAK TERBATAS
ANTARA IBUKOTA NEGARA ASEAN

Pemerintah – pemerintah Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Demokrasi Rakyat Laos (selanjutnya disebut "Laos"), Malaysia, Uni Myanmar, Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand, dan Republik Sosialis Vietnam, Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) (selanjutnya secara bersama-sama disebut "Para Pihak" atau secara sendiri-sendiri disebut "Pihak"):

MENGINGAT Persetujuan Multilateral ASEAN mengenai Jasa Angkutan Udara yang ditandatangani pada tanggal 20 Mei 2009 di Manila, Filipina (selanjutnya disebut "Persetujuan");

MENGAKUI bahwa Lampiran II Persetujuan tersebut memberikan penyelesaian Protokol-protokol Pelaksanaan yang wajib menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan dimaksud;

MENGAKUI juga ayat 3 Pasal I dari Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Peningkatan Kerja Sama Ekonomi ASEAN yang ditandatangani pada tanggal 28 Januari 1992 di Singapura, bahwa dalam pelaksanaan pengaturan ekonomi, dua atau lebih Negara-Negara Anggota dapat melaksanakan terlebih dahulu apabila Negara Anggota lain belum siap melaksanakan pengaturan tersebut; dan

BERKEINGINAN untuk menghilangkan pembatasan-pembatasan pada jasa angkutan udara dengan maksud untuk mencapai liberalisasi penuh di ASEAN pada tahun 2015,

TELAH MENYETUJUI HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT:

Pasal 1 – Definisi

Untuk maksud Protokol ini, istilah "kebebasan hak angkut kelima" berarti kebebasan hak angkut kelima titik antara dan titik setelah yang akan dioperasikan secara menyeluruh dalam ASEAN

Pasal 2 – Rute dan Hak Angkut

Perusahaan angkutan udara yang ditunjuk oleh masing-masing Pihak wajib diizinkan untuk melaksanakan jasa angkutan udara penumpang dari ibu kota negaranya ke ibu kota negara para Pihak lainnya dan sebaliknya dengan kebebasan penuh hak angkut ketiga, keempat dan kelima sejak tanggal 31 Desember 2010.

Pasal 3 – Kapasitas dan Frekuensi

Wajib tidak ada pembatasan terhadap kapasitas, frekuensi dan jenis pesawat udara yang berkaitan dengan jasa angkutan udara penumpang yang dilaksanakan berdasarkan Protokol ini sebagaimana diatur dalam Pasal 2.

Pasal 4 – Spesifikasi Titik

Ibu kota – ibu kota negara para Pihak adalah sebagai berikut :

Brunei Darussalam : Bandar Seri Begawan

Kamboja : Phnom Penh

Indonesia : Jakarta

Laos : Vientiane

Malaysia : Kuala Lumpur

Myanmar : Yangon

Filipina : Manila

Singapura : Singapura

Thailand : Bangkok

Vietnam : Hanoi

Pasal 5 – Ketentuan Akhir

1. Protokol ini wajib disimpan oleh Sekretaris Jenderal ASEAN yang wajib segera menyampaikan salinan naskah tersebut kepada masing-masing Pihak.

2. Protokol ini tunduk pada ratifikasi atau penerimaan oleh para Pihak yang telah meratifikasi atau menerima Persetujuan tersebut. Piagam Ratifikasi atau Penerimaan wajib disimpan oleh Sekretaris Jenderal ASEAN yang wajib segera memberitahukan kepada masing-masing Pihak mengenai penyimpanan tersebut.
3. Protokol ini wajib mulai berlaku pada tanggal penyimpanan Piagam Ratifikasi dan Penerimaan ketiga (ke-3) oleh Sekretaris Jenderal ASEAN dan hanya akan berlaku bagi para Pihak yang telah meratifikasi atau menerimanya. Bagi setiap Pihak yang meratifikasi atau menerima Protokol tersebut setelah penyimpanan Piagam Ratifikasi atau penerimaan ketiga (ke-3), Protokol dimaksud wajib mulai berlaku pada tanggal penyimpanan Piagam Ratifikasi atau penerimaan dari Pihak tersebut.
4. Setiap perubahan terhadap ketentuan-ketentuan Protokol ini, wajib berlaku berdasarkan kesepakatan seluruh Pihak, sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 16 Persetujuan tersebut.

SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, yang diberi kuasa untuk menandatangani oleh masing-masing Pemerintahnya, telah menandatangani Protokol 6 mengenai Kebebasan Hak Angkut Kelima yang Tidak Terbatas antara Ibukota Negara ASEAN.

DIBUAT di Manila, Filipina, pada tanggal 20 bulan Mei Tahun Dua Ribu Sembilan, dalam satu naskah asli dalam bahasa Inggris.

Untuk Brunei Darussalam:

ttd

PEHIN DATO ABU BAKAR APONG
Menteri Komunikasi

Untuk Kerajaan Kamboja:

ttd

MAO HAVANNAL
Menteri Negara
Kementerian Negara Bidang Penerbangan Sipil

Untuk Republik Indonesia:

ttd

JUSMAN SYAFII DJAMAL
Menteri Perhubungan

Untuk Republik Demokrasi Rakyat Laos:

ttd

SOMMAD PHOLSENA
Menteri Pekerjaan Umum dan Transportasi

Untuk Malaysia:

ttd

DATO' SRI ONG TEE KEAT
Menteri Transportasi

Untuk Uni Myanmar:

ttd

MAJOR GENERAL THEIN SWE
Menteri Transportasi

Untuk Republik Filipina:

ttd

LEANDRO R. MENDOZA
Menteri Transportasi dan Komunikasi

Untuk Republik Singapura:

ttd

RAYMOND LIM
Menteri Transportasi

Untuk Kerajaan Thailand:

ttd

SANTI PROMPHAT
Menteri Transportasi

Untuk Republik Sosialis Vietnam:

ttd

HO NGHIA DZUNG
Menteri Transportasi



**PROTOCOLS
ON UNLIMITED THIRD AND FOURTH FREEDOM TRAFFIC
RIGHTS BETWEEN ASEAN CAPITAL CITIES**

The Governments of Brunei Darussalam, the Kingdom of Cambodia, the Republic of Indonesia, the Lao People's Democratic Republic (hereinafter referred to as "Lao PDR"), Malaysia, the Union of Myanmar, the Republic of the Philippines, the Republic of Singapore, the Kingdom of Thailand and the Socialist Republic of Viet Nam, Member States of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) (hereinafter referred to collectively as "Contracting Parties" or individually as "Contracting Party"),

RECALLING the ASEAN Multilateral Agreement on Air Services signed on 20 May 2009 in Manila, Philippines (hereinafter referred to as "the Agreement");

RECOGNISING that Annex II of the Agreement thereof provides for the conclusion of Implementing Protocols which shall form integral parts of the Agreement;

RECOGNISING also paragraph 3 of Article I of the Framework Agreement on Enhancing ASEAN Economic Cooperation signed on 28 January 1992 in Singapore, that, in the implementation of economic arrangements, two or more Member States may proceed first if other Member States are not ready to implement these arrangements; and

DESIRING to remove restrictions on air services with a view of achieving full liberalisation in ASEAN by 2015,



HAVE AGREED AS FOLLOWS:**Article 1 – Routing and Traffic Rights**

The designated airline(s) of each Contracting Party shall be allowed to operate air passenger services from its capital city to the capital cities of the other Contracting Parties and vice versa with full third (3rd) and fourth (4th) freedom traffic rights by 31 December 2008.

Article 2 – Capacity and Frequency

There shall be no limitation on capacity, frequency and aircraft type with regard to air passenger services operated under this Protocol as provided in Article 1.

Article 3 – Specification of Points

The capital cities of the Contracting Parties as mentioned in Article 1 are listed below:

Brunei	Bandar Seri Begawan
Darussalam	
Cambodia	Phnom Penh
Indonesia	Jakarta
Lao PDR	Vientiane
Malaysia	Kuala Lumpur
Myanmar	Yangon
Philippines	Manila
Singapore	Singapore
Thailand	Bangkok
VietNam	HaNoi

Article 4 – Final Provisions

1. This Protocol shall be deposited with the Secretary-General of ASEAN who shall promptly furnish a certified copy thereof to each Contracting Party.
2. This Protocol is subject to ratification or acceptance by the Contracting Parties who have ratified or accepted the Agreement. The Instruments of Ratification or Acceptance shall be deposited with the Secretary-General of ASEAN who shall promptly inform each Contracting Party of such deposit.
3. This Protocol shall enter into force on the date of the deposit of the third (3rd) Instrument of Ratification or Acceptance with the Secretary-General of ASEAN and shall become effective only among the Contracting Parties that have ratified or accepted it. For each Contracting Party ratifying or accepting the Protocol after the deposit of the third (3rd) Instrument of Ratification or Acceptance, the Protocol shall enter into force on the date of the deposit of such Contracting Party of its Instrument of Ratification or Acceptance.
4. Any amendment to the provisions of this Protocol shall be effected by consent of all the Contracting Parties, as provided for under Article 16 in the Agreement.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorised to sign by their respective Governments, have signed Protocol 5 on Unlimited Third and Fourth Freedom Traffic Rights between ASEAN Capital Cities.



DONE at Manila, Philippines, this .. day of ..Y.....
in the Year Two Thousand and ..Jr.... in a single original
copy in the English language.

For Brunei Darussalam:

-r.rr2qvP
 J . . J
PEHIN DATO ABU BAKAR APONG
 Minister of Communications

For the Kingdom of Cambodia:

[Signature]

MAO HAVANNAL
 Secretary of State
 State Secretariat of Civil Aviation

For the Republic of Indonesia:

[Signature]

JUSMAN SYAFII DJAMAL
 Minister for Transportation



For the Lao People's Democratic Republic:



SOMMAD PHOLSENA

Minister of Public Works and Transport

For Malaysia:



DATO' SRI ONG TEE KEAT

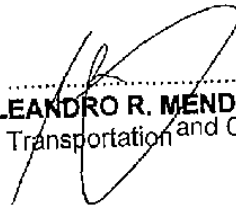
Minister of Transport

For the Union of Myanmar:

MAJOR GENERAL THEIN SWE

Minister for Transport

For the Republic of the Philippines:



LEANDRO R. MENDOZA

Secretary of Transportation and Communications

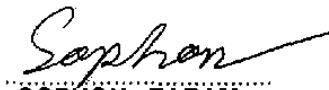


For the Republic of Singapore:



RAYMOND LIM
Minister for Transport

For the Kingdom of Thailand:



SOPHON ZARAM
Minister of Transport

For the Socialist Republic of Vietnam:



HO NGHIA DZUNG
Minister of Transport





**PROTOCOLS
ON UNLIMITED FIFTH FREEDOM TRAFFIC RIGHTS
BETWEEN ASEAN CAPITAL CITIES**

The Governments of Brunei Darussalam, the Kingdom of Cambodia, the Republic of Indonesia, the Lao People's Democratic Republic (hereinafter referred to as "Lao PDR"), Malaysia, the Union of Myanmar, the Republic of the Philippines, the Republic of Singapore, the Kingdom of Thailand and the Socialist Republic of Viet Nam, Member States of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) (hereinafter referred to collectively as "Contracting Parties" or individually as "Contracting Party"),

RECALLING the ASEAN Multilateral Agreement on Air Services signed on 20 May 2009 in Manila, Philippines (hereinafter referred to as "the Agreement");

RECOGNISING that Annex II of the Agreement thereof provides for the conclusion of Implementing Protocols which shall form integral parts of the Agreement;

RECOGNISING also paragraph 3 of Article I of the Framework Agreement on Enhancing ASEAN Economic Cooperation signed on 28 January 1992 in Singapore, that, in the implementation of economic arrangements, two or more Member States may proceed first if other Member States are not ready to implement these arrangements; and

DESIRING to remove restrictions on air services with a view of achieving full liberalisation in ASEAN by 2015,



HAVE AGREED AS FOLLOWS:**Article 1 – Definitions**

For the purposes of this Protocol, the term "fifth (5th) freedom traffic rights" means intermediate and beyond fifth freedom traffic rights which are to be operated wholly within ASEAN.

Article 2 – Routing and Traffic Rights

The designated airline(s) of each Contracting Party shall be allowed to operate air passenger services from its capital city to the capital cities of the other Contracting Parties and vice versa with full third (3'd), fourth (4th) and fifth (5th) freedom traffic rights by 31 December 2010.

Article 3 – Capacity and Frequency

There shall be no limitation on capacity, frequency and aircraft type with regard to air passenger services operated under this Protocol as provided in Article 2.

Article 4 – Specification of Points

The capital cities of the Contracting Parties are listed below:

Brunei Darussalam	Bandar Seri Begawan
Cambodia	Phnom Penh
Indonesia	Jakarta
Lao PDR	Vientiane
Malaysia	Kuala Lumpur
Myanmar	Yangon
Philippines	Manila
Singapore	Singapore
Thailand	Bangkok
VietNam	HaNoi

Article 5- Final Provisions

1. This Protocol shall be deposited with the Secretary-General of ASEAN who shall promptly furnish a certified copy thereof to each Contracting Party.
2. This Protocol is subject to ratification or acceptance by the Contracting Parties who have ratified or accepted the Agreement. The Instruments of Ratification or Acceptance shall be deposited with the Secretary-General of ASEAN who shall promptly inform each Contracting Party of such deposit.
3. This Protocol shall enter into force on the date of the deposit of the third (3'd) Instrument of Ratification or Acceptance with the Secretary-General of ASEAN and shall become effective only among the Contracting Parties that have ratified or accepted it. For each Contracting Party ratifying or accepting the Protocol after the deposit of the third (3'd) Instrument of Ratification or Acceptance, the Protocol shall enter into force on the date of the deposit of such Contracting Party of its Instrument of Ratification or Acceptance.
4. Any amendment to the provisions of this Protocol shall be effected by consent of all the Contracting Parties as provided for under Article 16 of the Agreement.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorised to sign by their respective Governments, have signed Protocol 6 on Unlimited Fifth Freedom Traffic Rights between ASEAN Capital Cities.



DONE at Manila, Philippines, this **ffit** day of **.MY**.....
in the Year **Two Thousand and Nrt** in a single original copy in
the English language.

For Brunei Darussalam:

ne:r
.....
PEHIN DATO ABU BAKAR APONG
Minister of Communications

For the Kingdom of Cambodia:

Mik, N
Secretary of State
State Secretariat of Civil Aviation

For the Republic of Indonesia:

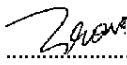
Jusman
.....
JUSMAN SYAFII DJAMAL
Minister for Transportation

For the Lao People's Democratic Republic:

Sommad
.....
SOMMAD PHOLSENA
Minister of Public Works and Transport



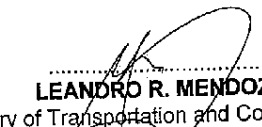
For Malaysia:


.....
DATO' SRI ONG TEE KEAT
Minister of Transport

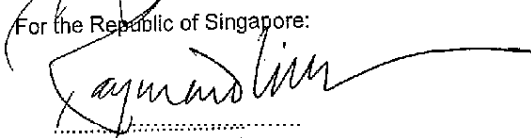
For the Union of Myanmar:

.....
MAJOR GENERAL THEIN SWE
Minister for Transport

For the Republic of the Philippines:


.....
LEANDRO R. MENDOZA
Secretary of Transportation and Communications

For the Republic of Singapore:

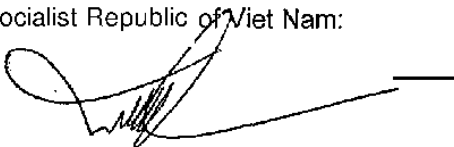

.....
RAYMOND LIM
Minister for Transport



For the Kingdom of Thailand:


.....
SOP ON ZARAM
Minister of Transport

For the Socialist Republic of Viet Nam:


.....
HO NGHIA DZUNG
Minister of Transport



Untuk Republik Singapura:

ttd

RAYMOND LIM
Menteri Transportasi

Untuk Kerajaan Thailand:

ttd

SANTI PROMPHAT
Menteri Transportasi

Untuk Republik Sosialis Vietnam:

ttd

HO NGHIA DZUNG
Menteri Transportasi